

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri kecil memiliki potensi yang sangat besar untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun masih banyak permasalahan yang dihadapi. Secara umum pengrajin masih lemah kedudukannya dalam konstelasi hubungandengan pihak-pihak lain di industri kerajinan, seperti pemasok barang, pemodal, pelanggan atau mitra usaha lain (Wijaya 2001; Sigito 2001; Tawardi 1999; Karsidi 1999).

Pertumbuhan usaha pengrajin yang tidak mandiri (otonom) seringkali terhambat karena: keterbatasan modal, keengganan untuk menambah hutang, keengganan untuk meningkatkan skala usaha atau menanggung resiko. Pengusaha kecil sering mengabaikan kemandirian (Getz, 2005). Menurut Karsidi (1999), pengrajin yang mandiri ialah pengrajin yang percaya diri dan bisa mengambil keputusan secara bebas dan bijaksana. Kemandirian pengrajin juga terkait dengan karakteristik personal, dukungan bisnis, dan lingkungan bisnisnya (Utami dan Sumardjo 2006).

Usaha pemberdayaan pengrajin diupayakan untuk memandirikan mereka, yaitu membuat agar kemampuan pengrajin tidak ter subordinasi pada pihak lain dalam menjalankan kegiatan produksi, pemasaran dan perolehan modal, dan mampu bekerjasama dengan individu, kelompok atau organisasi sejenis untuk mencapai kemajuan bersama.

Pemberdayaan masyarakat secara luas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Menurut Suhendra (2005), pemberdayaan masyarakat dapat diartikan bahwa masyarakat diberi kuasa dalam upaya untuk menyebarkan kekuasaan hingga mampu menguasai kehidupannya.

Pengrajin skala kecil dan menengah sering ter subordinasi ketika bekerjasama. Kebanyakan dari mereka belum memiliki pengetahuan dan ketrampilan membuat perjanjian secara tertulis, sehingga ketika terjadi masalah atau pelanggaran dalam perjanjian, pengrajin seringkali menjadi pihak yang lemah dan kalah. Dalam hal ini pemberdayaan pengrajin akan membantu mereka untuk melakukan *fair trade*.

Salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pemberdayaan para pengrajin adalah APIKRI (Asosiasi Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat Indonesia). Lembaga yang didirikan sejak 1987 ini membantu pengrajin dalam mengembangkan produk kerajinan dan pemasarannya. APIKRI memiliki visi untuk menjadi lembaga yang menyuarakan *fair trade*, perdagangan yang berkeadilan untuk memperkuat komunitas pengusaha kerajinan kecil dan menengah.

APIKRI melakukan pendampingan terhadap para pengrajin kecil dan menengah (kemudian disebut Pengrajin Partisipan) dalam pengembangan produk kerajinan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, mencari pasar untuk pemasaran produk kerajinan, dan juga masalah kekurangan modal usaha.

Pendampingan oleh APIKRI antara lain dilakukan dengan program penyuluhan dan pelatihan bagi para pengrajin partisipan untuk mengasah kemampuan pengrajin dan meningkatkan kemandirian mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program pemberdayaan yang dilakukan oleh APIKRI dan kemandirian dari para pengrajin yang menjadi partisipan dalam program pemberdayaan APIKRI.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan pengrajin partisipan yang telah dilakukan oleh APIKRI?
2. Apakah pengrajin yang menjadi partisipan program pemberdayaan APIKRI sudah mandiri?

C. Konsep.

C.1. Pemberdayaan

Bryant & White (1987) menyatakan pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat miskin dengan menciptakan mekanisme dari dalam (*build-in*) untuk meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adil, yakni dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh. Sementara Freire (dalam Sutrisno 1999) menyatakan *empowerment* bukan sekedar memberikan kesempatan rakyat menggunakan sumber daya dan biaya pembangunan saja, tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur yang opresif.

Konsep lain menyatakan bahwa pemberdayaan mempunyai makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Pemberdayaan dilakukan untuk melindungi dan membela yang lemah, serta untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang atau terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah (Priyono dan Pranarka, 1996).

Menurut Pranarka & Vidhyandika (1996), proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, kecenderungan primer yaitu proses pemberdayaan yang menekankan pada pemberian sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan kedua adalah kecenderungan sekunder yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Dalam pandangan Pearse dan Stiefel (1996), pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yakni primer dan sekunder. Kecenderungan primer berarti proses pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai

kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya.

Payne (1997) menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan, dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Sedangkan menurut Robinson (1994), pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak.

Sumardjo (1999) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat yang berdaya yaitu:

1. Mampu memahami diri dan potensinya;
2. Mampu merencanakan dan mengantisipasi kondisi perubahan ke depan;
3. Mampu mengarahkan dirinya sendiri;
4. Memiliki kekuatan untuk berunding;
5. Memiliki *bargaining power* yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.

Menurut Slamet (2003), yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu berbagai alternative, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko,

mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi.

Dari beberapa konsep yang telah dijelaskan diatas, pada umumnya upaya pemberdayaan merujuk pada upaya memandirikan masyarakat, memandirikan dalam artian menjadikan masyarakat mempunyai otoritas, dapat berdiri sendiri, merdeka dalam mengambil inisiatif dan dalam membuat keputusan kreatif untuk mengolah kemampuan yang ada dalam diri masyarakat tersebut.

C.2. Kemandirian.

Menurut Zakiah (2000), kemandirian merupakan salah satu unsur dari kepribadian dan kemandirian terdapat pada pribadi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Memiliki kebebasan untuk berinisiatif, kebebasan untuk berpendapat dan menuangkan ide-ide baru,serta mencoba sesuatu hal baru.
- b. Mampu mengambil keputusan sendiri dalam mengatasi masalah yang dihadapi tanpa bergantung pada orang lain.
- c. Mampu bertanggung jawab terhadap segala hal yang dikerjakan pada diri sendiri dan orang lain.
- d. Mampu mengendalikan diri.dalam melakukan suatu tindakan dan apabila melakukan suatu kesalahan akan cepat menyadarinya.

Menurut Danuri (1990), seseorang dapat dikatakan mandiri apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Adanya tendensi untuk berperilaku bebas dan berinisiatif, mampu bersikap dan berpendapat.
- b. Adanya tendensi untuk percaya diri dan tidak tergantung pada orang lain.
- c. Adanya sikap original (keaslian) yang bukan sekedar menerima orang lain.
- d. Tidak mengharapkan pengarahan dari orang lain.
- e. Adanya tendensi untuk mencoba sendiri segala sesuatu.

Dalam penelitian ini, tolak ukur pengrajin partisipan yang mandiri adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian dalam Modal Usaha

Kemandirian modal usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketidaktergantungan modal usaha pengrajin partisipan pada pihak luar. Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik usaha sendiri, biasanya berasal dari tabungan sendiri, warisan, menjual tanah atau barang.

2. Kemandirian dalam pembuatan kerajinan.

Konsep kemandirian pembuatan kerajinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketidaktergantungan pembuatan kerajinan pada pihak luar atau kebebasan pengrajin dalam mendesain dan pembuatan kerajinan dengan keterampilan yang dimiliki tanpa adanya ketergantungan pada pihak lain.

3. Kemandirian dalam pemasaran kerajinan.

Konsep kemandirian dalam pemasaran kerajinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketidak tergantungan pengrajin partisipan dalam pemasaran hasil kerajinan pada pihak luar atau dengan kata lain adanya kebebasan pengrajin partisipan dalam memasarkan hasil kerajinannya.

C.3. Pengrajin Partisipan.

Pengrajinialah orang yang pekerjaannya membuat barang-barang kerajinan atau orang yang mempunyai keterampilan berkaitan dengan pembuatan barang kerajinan tertentu. Barang-barang tersebut pada umumnya tidak dibuat dengan mesin, tetapi dengan tangan. Pengrajin Partisipan dalam penelitian ini adalah para pengrajin didampingi dan diberdayakan oleh APIKRI.

D. Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan baik metode deskriptif kuantitatif maupun kualitatif. Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Penelitian deskriptif berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya (Best, 1982:119).

Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh APIKRI dalam memandirikan pengrajin partisipan. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Margono, 2005:36) penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

Sedangkan Deskriptif kuantitatif digunakan untuk menjelaskan permasalahan kedua yaitu apakah pengrajin partisipan sudah mandiri. Dalam penelitian ini deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu keadaan dengan mengungkapkan fakta mengenai kemandirian pengrajin partisipan APIKRI.

D.1. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di daerah Imogiri Barat, Bantul, Yogyakarta, yang menjadi lokasi para pengrajin yang diberdayakan oleh APIKRI.

D.2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam hal ini peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yakni pengurus APIKRI dan para pengrajin.

b. Observasi partisipatif

Selama melakukan observasi, peneliti terlibat dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh APIKRI, yaitu ikut serta dalam pendampingan dan penyuluhan masyarakat. Peneliti juga ikut serta dalam rapat-rapat yang diadakan oleh APIKRI.

Peneliti juga terlibat dalam lingkungan kehidupan disekitar lokasi penelitian, berinteraksi secara aktif dengan subyek penelitian. Hal ini dilakukan untuk membangun komunikasi dengan para pengrajin untuk dapat mempermudah peneliti menggali data dari informan.

c. Kuesioner.

Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari jawaban responden (pengrajin partisipan APIKRI) terhadap kuesioner yang dibagikan kepada mereka. Pertanyaan yang ada dalam kuesioner berupa pertanyaan tertutup. Kuesioner yang disebarkan kepada responden sejumlah 54 buah.

D.3. Populasi dan Sampel

a. Populasi.

Menurut Sugiyono pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:80). Dalam penelitian ini populasi yang ditentukan oleh peneliti adalah seluruh pengrajin partisipan APIKRI yang terdata sampai dengan tahun 2012 yang berjumlah **117** orang.

b. Sampel

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampel acak sederhana, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Dalam penentuan jumlah sampel, peneliti menggunakan rumus Slovin (dalam Krisyantono 2008:162), dengan tingkat presisi sebesar 10%.

$$\text{Rumus Slovin : } n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir atau diinginkan adalah 10%.

$$n = \frac{117}{1 + 117(0,1)^2}$$

$$n = 53,918$$

dibulatkan menjadi **54** sampel

D.4. Analisis Data.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Analisis Kualitatif

Dalam penelitian ini, proses analisis data kualitatif dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

A. Klasifikasi Data

Dalam kegiatan ini peneliti memilih dan memilah-milah serta mengklasifikasikan dan mengkroscek data agar dapat diolah untuk kemudian mendapatkan relevansi data yang mengacu pada focus penelitian.

B. Display Data

Dalam kegiatan ini peneliti menyajikan data yang bertujuan untuk memaparkan gambaran kongkrit subyek penelitian serta memaparkan obyek penelitian.

C. Pembahasan

Dalam kegiatan ini peneliti melakukan analisis data yang diperoleh dan di kaji sesuai dengan tujuan penelitian.

D. Kesimpulan

Dalam kegiatan ini peneliti membuat kesimpulan. Kesimpulan diambil dari data yang sudah terkumpul lalu disusun dalam satu kesatuan kemudian di tarik kesimpulan sebagai jawaban atas persoalan yang diangkat.

b. Analisis deskriptif kuantitatif

Peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif berupa distribusi frekuensi. Dalam pengolahan data dilakukan dengan perhitungan rata-rata hitung (*arithmetic mean*) dengan menggunakan SPSS yang kemudian disusun dalam distribusi frekuensi. Selanjutnya hasil distribusi frekuensi dideskripsikan.